

**MANAJEMEN KONFLIK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN  
TOL PADANG-SICINCIN OLEH PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PADANG-PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**OLEH :**

**MIFTAH URRAHMI**

**(16042147)**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2020**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan  
Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin Oleh Pemerintah  
Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

Nama : Miftah Urrahmi

Nim / TM : 16042147/2016

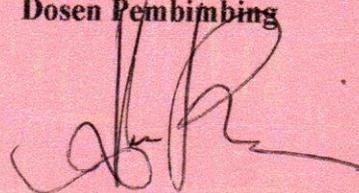
Program Studi : Administrasi Negara

Jurusan : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 Juni 2020

**Disetujui oleh :**  
**Dosen Pembimbing**



**Nora Eka Putri, S.IP., M.Si**  
**NIP. 198503122008122006**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

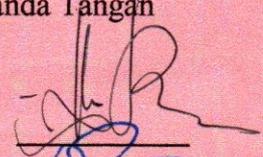
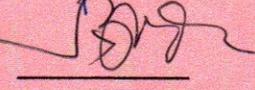
Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada Hari Selasa, 16 Juni 2020 Jam 08.00 WIB-10.00WIB

### **Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang- Sicincin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

Nama : Miftah Urrahmi  
NIM/TM : 16042147/2016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

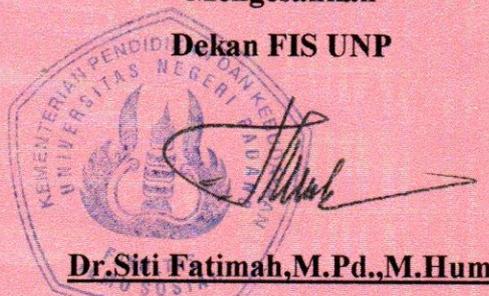
Padang, 7 Juli 2020

#### **Tim Peguji**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	1. 
Anggota	Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	2. 
Anggota	Adil Mubarak, S.IP, M.Si	3. 

**Mengesahkan**

**Dekan FIS UNP**



**Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum**

**NIP.19610218 198403 2 001**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftah Urrahmi  
NIM/TM : 16042147/2016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 7 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Miftah Urrahmi

2016/16042147

## ABSTRAK

**MIFTAH URRAHMI :**            **Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan  
2016/16042147**                **Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin Oleh Pemerintah  
Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

Latar belakang dari penelitian ini adalah pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin belum diselesaikan sehingga menimbulkan konflik sosial antara Pemerintah dengan masyarakat. Konflik ini menyebabkan pembangunan jalan tol menjadi terhambat yang pada awalnya infrastruktur jalan tol ini dapat digunakan pada tahun 2020 akan tetapi hingga saat ini proses konstruksi masih mencapai 18% pada ruas Padang-Sicincin. Konflik disebabkan oleh masyarakat tidak menerima keputusan Pemerintah terhadap harga lahan mereka yang ditakar terlalu rendah serta tidak memberikan ganti rugi secara adil kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan manajemen konflik pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin serta factor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan berlokasi di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* terdiri dari 8 orang masyarakat terdampak serta pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pembangunan jalan tol Padang-Sicincin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas padang-sicincin dilihat dari beberapa tahap dimulai pada tahap pengenalan, diagnosis, mencari solusi yang telah disepakati, pelaksanaan solusi, dan evaluasi, serta faktor yang mempengaruhi manajemen konflik disebabkan oleh peristiwa sehari-hari dimana ada rasa jengkel terhadap sesuatu, adanya tantangan, dan pertentangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap manajemen konflik pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin sudah dilakukan akan tetapi masih belum maksimal terutama pada tahap pengenalan dikarenakan Pemerintah hanya melakukan sosialisasi pembangunan jalan tol ini dalam satu kali sehingga dibutuhkan pengkajian serta pengenalan yang insentif dan mendalam agar konflik dapat segera selesai.

**Kata Kunci :** *Infrastruktur, Konflik Sosial, Manajemen Konflik Jalan Tol Padang-Sicincin*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bantuan, dorongan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibuk Nora Eka Putri S.IP,M.Si selaku pembimbing yang telah mengerahkan, memimbing, dan memotivasi, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Aldri Frinaldi,S.H,M.Hum,Ph.D dan Bapak Adil Mubarak,S.IP,M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritikan, saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Pimpinan Jurusan, Dosen , dan Staff Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Yufrizal selaku pihak PUPR Sumatera Barat yang telah memberikan saya telah memberikan saya informasi berupa data dan penjelasan terkait dengan masalah saya pada penelitian ini.
5. Teristiwanya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak kenal lelah dan penuh kesabaran dalam mendidik penulis sehingga penulis dapat menjalani hari-hari sampai sekarang.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, arahan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan oleh Allah SWT, amiiin. Penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin, namun jika masih terdapat kekurangan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, 05 Juni 2020

**MIFTAH URRAHMI**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ABSTRAK**.....i

**KATA PENGANTAR**.....ii

**DAFTAR ISI**.....iv

**DAFTAR TABEL**.....vi

**DAFTAR GAMBAR**.....vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....6

### BAB II KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Literatur

1. Konsep Manajemen Konflik.....8

2. Konsep Administrasi Pertanahan.....25

3. Pengertian Infrastruktur.....35

B. Kajian Penelitian yang Relevan.....40

C. Kerangka Konseptual.....42

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....43

B. Lokasi Penelitian.....44

C. Informan Penelitian.....44

D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum	
1. Sejarah Kabupaten Padang Pariaman.....	52
2. Jalan Tol Padang-Pekanbaru.....	61
B. Temuan Khusus	
1. Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin.....	63
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Konflik Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin.....	70
C. Pembahasan	
1. Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin.....	76
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Konflik Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin	

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Kajian Penelitian yang Relevan.....	40
Tabel 2. Informan Penelitian.....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.....	56
Gambar 2. Proses Pembangunan Tol Ruas Padang-Sicincin.....	61
Gambar 3. Demo Masyarakat ke Kantor Gubernur.....	75

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Barang public (public goods) adalah barang yang digunakan oleh masyarakat secara gratis dan dapat dirasakan manfaatnya. Adanya barang public ini menandakan bahwa sejahtera serta kualitasnya masyarakatnya, jika barang public masih belum memadai berarti masyarakatnya juga belum makmur dan sejahtera. Biasanya, penyediaan barang public dibiayai dari pemungutan pajak yang mendorong pembangunan infrastruktur yang tentunya akan membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat. (Andhika, 2017).

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan penyediaan infrastruktur. Berdasarkan (Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005) pasal 4 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, jenis pembangunan infrastruktur terbagi dari infrastruktur transportasi yang terdiri dari pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, stasiun kereta api. Infrastruktur jalan terdiri atas jalan tol dan jembatan tol. Infrastruktur pengairan terdiri atas saluran pembawa air baku. Infrastruktur air minum terdiri atas bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum. Infrastruktur air limbah terdiri atas instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang terdiri dari

pengangkut dan tempat pembuangan, infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik, dan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

Barang public dengan penyediaan infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti jalan tol, dalam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 /Prt/M/2018.) pasal 1 yang dimaksud jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Berdasarkan berita pada CNN Indonesia, rencana Pemerintah untuk membangun jalan tol Sumbar-Pekanbaru sepanjang 244 km ini dibagi dalam beberapa ruas, dimulai dari ruas Padang-Sicincin dengan panjang 36 km, Sicincin-Payakumbuh dengan panjang 78 km, Payakumbuh-Pangkalan dengan panjang 45 km, Pangkalan-Bangkinang dengan panjang 56 km, dan terakhir Bangkinang-Pekanbaru dengan panjang 37 km.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yufrizal selaku pihak PUPR Sumatera Barat dan bertanggung jawab pada jalan tol ruas Padang-Sicincin pada tanggal 6 Februari pukul 10.00 WIB menyebutkan bahwa :

“...Pembangunan jalan tol Sumbar-Pekanbaru, khususnya ruas Padang-Sicincin ini mengalami beberapa permasalahan pada pembangunannya. Penyebab utamanya yaitu sengketa pembebasan lahan dan sengketa kepemilikan. Sengketa pembebasan lahan yaitu

terjadinya konflik vertical antara Pemerintah dengan masyarakat terkait dengan perbedaan harga yang ditakar oleh Tim Appraisal dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya sengketa kepemilikan, adanya konflik horizontal antar masyarakat mengenai pemecahan sertifikat tanah ulayat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. yang dipertanggungjawabkan oleh 1 mamak ahli waris...”

Dikutip pada berita Antaranews, tertundanya pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin ini yang rencana awal akan siap dan dapat digunakan pada tahun 2019 menimbulkan konflik vertical, yaitu antara Pemerintah dengan masyarakat perihal sengketa pembebasan lahan. Pihak yang berkontribusi dalam pembangunan jalan tol adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Barat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Pemerintah Daerah, Wali Nagari hingga Kepala Jorong, sedangkan pihak yang menjadi penengah dalam pelaksanaan manajemen konflik ini yaitu Pengadilan Negeri Pariaman yang menjadi wadah bagi pihak yang berkonflik. Bagi masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan jalan tol maka dapat diambil ganti rugi dari pembebasan lahan pada Pengadilan Negeri Pariaman.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Daman Huri selaku Wali Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10.00 mengatakan, pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin ini menggunakan tanah milik masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang sebagian besar adalah tanah ulayat. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang

dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk) dan pengelola dan pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing suku yang ada. Jumlah masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol ini berjumlah 109 obyek dimana 60 masyarakat dan 49 obyek diantaranya adalah kapling tanah serta tanaman hias yang akan diberikan ganti rugi (restitusi) oleh Pemerintah. Masyarakat yang terkena dampak tidak mendapatkan keuntungan atau kemudahan dalam menggunakan jalan tol nantinya, melainkan hanya akan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Padang Pariaman.

Pada ruas Pekanbaru sendiri tepatnya di Kandis, sebuah kecamatan di Kabupaten Siak Riau, pembangunan jalan tol masih mengalami penghambatan dikarenakan masyarakat tidak terima dengan harga yang ditakar oleh Tim Appraisal yang sangat rendah, yaitu sebesar Rp.18 ribu/m. Masyarakat merasa tidak adil dengan harga tersebut, karena mereka menganggap tanah mereka layak untuk diberikan restitusi dengan harga yang tinggi dapat dilihat pada akun youtube pengeksekusian lahan untuk pembangunan jalan tol pekanbaru-dumai

Konflik lain yaitu adanya berbagai pihak yang setuju (pro) dan tidak setuju (kontra) dengan pembangunan jalan tol ini, karena dilihat dari manfaat dari jalan tol itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan salah satu

masyarakat yang terkena dampak dari jalan tol pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 09.00 WIB menyebutkan bahwa :

“...Sumatera Barat sebenarnya tidak butuh akan jalan tol karena melalui jalan utama pun sebenarnya juga bisa, jikalau alasannya untuk meminimalisis waktu tempuh dikarenakan jika menggunakan jalan utama takut akan macet, padahal macet pun tidak setiap hari melainkan di hari-hari tertentu ataupun terjadinya bencana seperti tanah longsor ataupun kecelakaan. Kalau seperti itu mengapa tidak meminimalisirkan bencana saja dahulu? Misalnya seperti melebarkan jalan sehingga kecelakaan dapat teratasi. Dan juga apabila tol ini dibangun, maka masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah akan mendapatkan dampak yang paling buruk, yaitu penghasilan mereka akan menurun bahkan juga bisa mati..”

Menurut pihak yang menyetujui (pro) terhadap pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin, berdasarkan wawancara dengan Bapak Herman pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 11.00 WIB menyebutkan bahwa :

“...Dengan adanya jalan tol ini akan meminimalisir waktu tempuh yang normalnya dari Padang ke Pekanbaru akan memakan 9-10 jam menjadi 3-4 jam, sehingga barang yang dibawa dari Pekanbaru hendak ke Padang juga tidak akan layu ataupun busuk sehingga harga jual juga tidak akan turun..”

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol Padang Pekanbaru khususnya ruas Padang-Sicincin ini menimbulkan beberapa permasalahan. Konflik yang terjadi ini tidak akan selesai jika tidak akan pihak yang ingin menyelesaikannya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen konflik pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang – Sicincin?

**C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang Manajemen Konflik Terhadap Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin oleh Padang Pariaman, khususnya dari perspektif advokasi kebijakan.

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen konflik pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang – Sicincin.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan pembangunan khususnya manajemen konflik
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi :

- a. Bagi Institusi Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam bidang manajemen konflik dan untuk menambah wawasan tentang pembangunan.
- b. Bagi profesi untuk mengetahui persepsi terhadap pembangunan.
- c. Peneliti lain sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya maupun penelitian yang terkait dengan manajemen di bidang pembangunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Manajemen Konflik**

##### **1. Pengertian Manajemen**

Menurut (Rausch, 1990) manajemen berarti kegiatan yang mengikutsertakan koordinasi serta pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga dapat terselesaikan dengan efisien dan efektif.

Sedangkan menurut Mary Parker Follet dalam (Kotler, 2015) mengartikan manajemen adalah kegiatan seni untuk dapat menyelesaikan pekerjaan melalui bantuan orang lain.

Dari penjelasan pengertian manajemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki arti sebagai salah satu cara dalam pengambilan keputusan dan kegiatan yang terhubung dengan menggunakan bantuan orang lain .

##### **a. Teori Manajemen**

Teori manajemen menurut (goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019) teori manajemen terbagi atas tiga macam, yaitu :

###### **1) Teori Manajemen Tradisional**

Tradisional memiliki arti bahwa teori ini sangat lah fokus dan tergantung pada ilmu pengetahuan manusia.

###### **2) Model Human Relations**

Teori atau model Human Relations ini dapat diartikan bahwa manajemen harus mampu mencari keterampilan dan metode yang sesuai, tetapi tidak juga mengharapkan standar yang lengkap serta perilaku tanpa membawa perasaan dari tiap pegawai.

## **2. Pengertian Konflik**

Menurut (Ekawarna, 2018), konflik berarti saling bertabrakan, saling bertentangan, dan saling bertengkar. Sedangkan menurut Folger dalam (Ekawarna, 2018), konflik adalah komunikasi antar orang-orang yang saling berhubungan dan bergantung, dan merasakan tujuan serta gangguan serta campur tangan yang tidak cocok antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu perselisihan, perbedaan pendapat, perdebatan antara individu satu dengan yang lain terhadap nilai, sumber daya, serta gagasan.

### **a. Bentuk Konflik**

Menurut (Ekawarna, 2018), bentuk – bentuk konflik terbagi atas 3 yaitu :

#### **1) Konflik Hubungan (Relationship Conflict)**

Konflik hubungan terjadi apabila adanya ketidaksepakatan antar individu di dalam kelompok, termasuk pertikaian, pertengkar, kerusuhan. Konflik ini menghasilkan tingkat emosi individu ke arah

negatif misalnya kekhawatiran, stress, dan kegelisahan dalam rangka ditolak oleh anggota kelompoknya.

## 2) Konflik Tugas (Task Conflict)

Penyebab dari konflik tugas ini terjadi ketika ketidaksesuaian antara tugas yang dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai. Didalamnya termasuk disiplin kerja, kepuasan kerja, reward, mutasi, dan promosi pekerjaan.

## 3) Konflik Proses

Konflik proses terjadi ketika proses dalam mencapai tujuan tersebut yang banyak tidak setuju atau terjadinya keraguan serta kebimbangan. Membahas bagaimana mereka melakukan pekerjaan tersebut, siapa yang akan melakukannya, dengan cara apa mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menurut Kurtzberg dalam (Ekawarna, 2018), bentuk konflik dibedakan atas 3 macam yaitu :

### 1) Konflik berbasis proses kerja

Konflik berbasis proses kerja didefinisikan bagaimana cara proses , pekerjaan, kewajiban, hak serta peran yang harus dipertanggung jawabkan oleh anggota dalam tim.

2) Konflik berbasis hubungan

Konflik berbasis hubungan adalah yang terjadi pada hubungan atau interaksi antara anggota kelompok.

3) Konflik berbasis tugas

Konflik berbasis tugas ini terjadi ketika terjadi pertikaian terhadap perbedaan pendapat antar anggota kelompok.

Menurut Ohbuchi dalam (Ekawarna, 2018), bentuk konflik terdiri dari 3 bentuk, diantaranya:

1) Konflik kepentingan (*conflict of interest*)

Konflik kepentingan yang berkaitan dengan permasalahan diantara mereka dan kelompok kepentingan (stakeholder).

2) Konflik kognitif (*cognitif conflict*)

Konflik kognitif terjadi ketika beberapa orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap sesuatu.

3) Konflik nilai (*value conflict*)

Konflik *value* terjadi apabila adanya perbedaan pendapat, respon, dan tanggapan terhadap nilai atau harapan dari kelompok tersebut.

Menurut Runde dan Flanagan dalam (Ekawarna, 2018) , menyebutkan bahwa bentuk konflik terbagi atas 5 level, diantaranya :

1) Level pertama yaitu perbedaan (differences)

Perbedaan terjadi ketika pihak yang ikut terlibat menindaklanjuti situasi dari pandangan yang berbeda, tetapi dari sisi lain mereka sadar dengan pikiran mereka serta kepentingan anggota kelompok.

2) Level kedua yaitu kesalahpahaman (misunderstanding)

Kesalahpahaman terjadi ketika dua orang atau lebih merasakan perbedaan pendapat atau bisa juga kesalahpahaman terjadi ketika salah dalam menafsirkan sesuatu.

3) Level ketiga adalah ketidaksepakatan (disagreement)

Ketidaksepakatan terjadi ketika dua orang atau lebih menilai sesuatu dengan pandangan yang berbeda serta mereka merasakan ketidaknyamanan atas ketidaksetujuan.

4) Level keempat adalah perselisihan (discord)

Perselisihan bermula dari terjadinya pihak yang mulai memperebutkan sesuatu, mengkritik, dan menjatuhkan satu sama lain.

5) Level kelima adalah polarisasi (polarization)

Polarisasi terjadi ketika permasalahan atau konflik sudah mencapai tingkat yang lebih serius atau permasalahan sudah pada tingkat yang klimaks sedangkan permasalahan tersebut belum juga terselesaikan.

Sedangkan menurut Bodtker et al dalam (Ekawarna, 2018), bentuk konflik dibedakan atas :

1) Sikap (*attitude*)

Sikap berarti pikiran, tindakan. Sikap dipengaruhi oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kemarahan, emosi tak terkontrol, dan kebencian.

2) Perilaku (*behaviour*)

Perilaku adalah bisa dalam bentuk kerja sama untuk positif dan pemaksaan untuk negatif. Perilaku konflik bisa dicontohkan seperti keencian, pemaksaan, perbuatan yang menyakiti.

3) Kontradiksi (*contradiction*)

Kontradiksi berarti nilai (*value*) dan kepentingan. Kontradiksi merujuk pada situasi konflik yang mana adanya ketidaksesuaian situasi dengan tujuan konflik, ketidaksesuaian antara nilai sosial dengan struktur sosial.

**b. Jenis-Jenis Konflik**

Menurut (Ekawarna, 2018), tipe konflik terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya :

1) Konflik pribadi (*personal conflict*)

Konflik pribadi berarti konflik yang terjadi antara dua orang yang berselisih paham. Penyebab konflik pribadi terdiri dari, kecerdasan

emosional, jenis kepribadian, kurangnya keterampilan, dan kurangnya mendapat perhatian (Cotae dan Montemayor dalam (Ekawarna, 2018).

2) Konflik Intrapersonal (*Intrapersonal Conflict*)

Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada diri seseorang. Konflik ini terjadi ketika adanya dua keinginan yang tidak bisa dipenuhi secara bersamaan.

3) Konflik Peran (*Role Conflict*)

Konflik peran terjadi apabila individu harus memenuhi keharusan yang berlawanan dari dua atau lebih anggota organisasi yang terpisah. Menurut Schemerhorn, Hunt & Osborn menyebutkan bahwa konflik peran terjadi ketika dua orang atau lebih mendapatkan peran yang tidak sesuai dengan keahliannya.

4) Konflik Interpersonal (*Interpersonal Conflict*)

Konflik interpersonal terjadi ketika individu melakukan komunikasi untuk menghasilkan tujuan. konflik ini terjadi pada kelompok kerja, organisas, yang beranggotakan dua orang atau lebih.

Menurut Luthans, sumber konflik interpersonal terdiri atas, (a) *personal differences*, setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda sesuai dengan tradisi keluarga turun temurun. (b) *information deficiency*, interaksi menjadi sumber utama dalam penyebab konflik, penyampaian informasi yang berbeda akan menyebabkan timbulnya konflik. (c) *role incompatibility*, terjadi ketika

individu memiliki peran yang tidak sesuai dengan tujuan, keinginan serta kebutuhan yang dimilikinya. (d) *environmental stress*, terjadi ketika stres yang terjadi di lingkungan sekitar organisasi seperti tekanan saat adanya kompetisi.

5) Konflik Antarkelompok (*Intergroup Conflict*)

Konflik antarkelompok terjadi ketika kelompok satu melakukan interaksi dengan kelompok lainnya secara kolektif. Adanya sumber konflik antarkelompok yaitu (a) kohesi, yaitu kedekatan anggota kelompok dengan kelompoknya sering menyebabkan konflik. (b) struktur tipe kepemimpinan, (c) status individu, tingkat serta derajat yang berbeda dalam kelompok akan menyebabkan konflik terjadi.

6) Konflik Antarorganisasi (*Interorganizational Conflict*)

Konflik antarorganisasi berarti konflik yang terjadi antar rekan kerja, atau antarkelompok dalam organisasi yang berbeda. Konflik ini muncul dalam bentuk persaingan dan bahkan kebencian, seperti persaingan antarperusahaan.

7) Konflik Keluarga (*Family Conflict*)

Konflik yang terjadi di dalam keluarga, seperti perceraian orangtua. Menurut Strohschein, ia melakukan penelitian pada anak berusia empat sampai tujuh tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh perceraian terhadap anak-anak. Dan hasil dari penelitian ini adalah perceraian orangtua sangat berpengaruh

diantaranya, anak-anak akan mengalami depresi dan kecemasan yang tinggi.

8) Konflik Keluarga-Pekerjaan (Work-Family Conflict)

Konflik yang terjadi pada kehidupan kerja (work-life) dan juga terjadi pada kehidupan keluarga. Misalnya, seorang perawat wanita harus mengurus kehidupan rumah tangganya dan secara bersamaan ia juga harus menjadi perawat di rumah sakit. Kondisi seperti inilah yang didefinisikan konflik keluarga-pekerjaan.

**c. Karakteristik Konflik**

Menurut (Budiati, 1980), karakteristik konflik terbagi atas :

- 1) Dengan banyaknya konflik yang terjadi, maka fokus terhadap konflik tersebut juga akan terjadi.
- 2) Keinginan pribadi yang semakin meningkat. Dan menyelamatkan wajah sendiri lebih baik untuk tingkat konflik yang sudah di level atas.
- 3) Orang-orang yang menyenangkan akan berubah menjadi pribadi yang membosankan ketika terjadinya konflik.
- 4) Pada strategi manajemen konflik yang bekerja pada tingkat yang lebih rendah sering tidak dianggap dan efektif.
- 5) Konflik bisa saja melampaui batas yang sudah ditentukan sebelumnya

- 6) Orang-orang akan mengalami pribadi yang berbeda ketika terjadi konflik, tetapi konflik yang terjadi pada kelompok dapat diidentifikasi.

#### **d. Penyebab konflik**

Menurut Henri dalam (Ekawarna, 2018), konflik terjadi disebabkan dalam suatu organisasi dikarenakan keterbatasan mengeluarkan pendapat dan keterbatasan dalam kebebasan.

Menurut Butler dalam (Ekawarna, 2018), konflik bukan hanya akan mengacaukan situasi, juga dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan untuk organisasinya.

Menurut (Ekawarna, 2018), sumber utama konflik terdiri atas :

- 1) Perbedaan pendapat ketika orang tersebut sedang menderita stres.
- 2) Adanya situasi saat adanya bentrokan perihal peran seseorang dengan anggota yang lain dalam organisasi.
- 3) Usaha mereka untuk mencapai kepentingan pribadi semata.
- 4) Konflik bersumber dari permasalahan yang muncul ketika orang tersebut ikut campur dengan masalah yang umum dalam orientasi yang berbeda.
- 5) Pribadi yang saling ketergantungan, serta komunikasi dan interaksi yang sulit
- 6) Adanya tekanan dari luar yang menekan internal organisasi.

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam (Ekawarna, 2018), konflik muncul dalam beberapa keadaan diantaranya :

- 1) Adanya kepribadian yang berbeda
- 2) Adanya nilai yang berbeda
- 3) Kekaburan terhadap batasan pekerjaan
- 4) Adanya perebutan terhadap sumber daya yang sangat terbatas
- 5) Tidak demokratisnya dalam pengambilan keputusan
- 6) Dalam pengambilan keputusan hanya dilakukan satu arah
- 7) Buruknya komunikasi antar anggota organisasi
- 8) Persaingan antardepartemen dalam suatu organisasi
- 9) Pekerjaan yang tidak seimbang dengan kemampuan, dilihat dari tenggang waktu, batasan waktu, peraturan yang sangat ketat, dan kebijakan yang sangat mengikat anggota dalam organisasi.
- 10) Harapan yang tidak terpenuhi, termasuk di dalamnya reward, gaji, dan beban kerja.
- 11) Organisasi yang terlalu kompleks
- 12) Tidak selesainya konflik.

Sedangkan menurut Kumar dalam (Ekawarna, 2018), konflik terjadi ketika tingkat ketergantungan yang berlebihan yang bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan serta komitmen dalam kelompok.

### **e. Dampak Konflik**

Menurut Omisore & Abiodun dalam (Ekawarna, 2018), dampak positif yang ditimbulkan dari konflik adalah :

- 1) Mendorong pribadi untuk bersikap baik dan bekerja lebih giat.
- 2) Dengan adanya konflik, maka dapat memberikan kesempatan untuk seseorang agar dapat melepaskan perilaku yang agresif.
- 3) Konflik dapat memotivasi anggota dalam organisasi untuk meninjau tujuan mereka terhadap organisasi tersebut.
- 4) Dengan adanya konflik, dapat menambah variasi dalam situasi kerja, karena jika suasana kerja tidak bervariasi maka kehidupan kerja akan sangat membosankan sehingga para pegawai tidak bersemangat dalam melakukan pekerjaan.
- 5) Konflik berguna untuk memperkuat hubungan antar individu di dalam kelompok.
- 6) Konflik juga dapat menginspirasi kreativitas pribadi dalam suatu kelompok.
- 7) Dampak positif dari konflik adalah dapat saling berbagi dan menghormati pendapat antar pribadi. Anggota dalam organisasi bersama-sama untuk menyelesaikan konflik.
- 8) Konflik juga dapat meningkatkan komunikasi untuk masa depan. Konflik dapat menyatukan pribadi antar kelompok serta dapat

membantu mereka untuk belajar lebih satu sama lain. Konflik juga dapat mempelajari sifat dan gaya komunikasi seseorang dalam suatu kelompok serta penyelesaian masalah pada konflik untuk masa depan.

Menurut Beru et al dalam (Ekawarna, 2018), dampak negatif dari konflik terdiri atas :

- 1) Tanggapan psikologi terjadi ketika seseorang tidak peduli terhadap suatu hal, termasuk berkurangnya minat kerja, ketidakpuasan yang dirasakan terhadap pekerjaan.
- 2) Tanggapan perilaku yaitu menunjukkan perilaku yang negatif seperti, meminum minuman keras, tidak nafsu makan, tidak mau menerima saran orang lain.
- 3) Tanggapan fisik seperti tidak didengar dan dianggap sehingga dapat menimbulkan beberapa penyakit, contohnya magh, tekanan darah meningkat, sakit kepala

### **3. Pengertian Manajemen Konflik**

Menurut Ross at al dalam (Ekawarna, 2018), manajemen konflik merupakan tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk megarahkan perselisihan ke arah yang positif seperti kedamaian, dan ketenangan. Sedangkan menurut Minnery dalam (Ekawarna, 2018), menyebutkan bahwa manajemen konflik adalah proses untuk mengatasi konflik tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik mempunyai artcara untuk mengelola konflik itu sendiri,

#### **a. Teknik-Teknik Manajemen Konflik**

Menurut Robbins dalam (Ekawarna, 2018), menyebutkan teknik dalam manajemen konflik adalah :

##### 1) Perubahan prosedural

Perubahan prosedural berarti merujuk pada perubahan atau pergantian prosedur atau langkah-langkah yang akan diambil.

##### 2) Perubahan Personel

Perubahan personel adalah pemindahan individu ke dalam atau luar proyek untuk menyelesaikan konflik kepribadian individu tersebut.

##### 3) Perubahan otoritas

Perubahan otoritas adalah memperjelas atau memperketat garis wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk mengurangi konflik.

##### 4) Perubahan tata letak

Perubahan tata letak merupakan mengatur ulang kembali ruang kerja untuk menyelesaikan suatu konflik.

#### **b. Gaya Manajemen Konflik**

Menurut Blake & Mouton dalam (Ekawarna, 2018), gaya manajemen konflik terdiri dari :

- 1) Gaya pertama ini adalah gaya menarik diri, dan butuh waktu untuk pendinginan untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. gaya ini tidak boleh digunakan langsung dengan konflik yang terjadi.
- 2) Akomodatif, akomodatif adalah pendekatan yang sangat memuaskan untuk mendapatkan kesesuaian demi menghindari perselisihan.
- 3) Pemaksaan, pemaksaan berarti menggunakan kekuatan demi menyelesaikan konflik.
- 4) Kompromi, kompromi adalah tawar-menawar, berarti menerima sesuatu dengan mengharapkan imbalan.
- 5) Kolaborasi, kolaborasi adalah teknik yang paling baik untuk diterapkan untuk mengelola konflik. Kolaborasi berguna untuk mengelola konflik yang sangat penting dan bersifat rahasia.
- 6) Memecahkan masalah menyiratkan konfrontasi langsung, gaya ini didefinisikan ketika kedua pihak setuju untuk berdamai, menyelesaikan masalah serta mencari solusi yang nantinya akan disetujui bersama.

Konsep atau gaya untuk menganalisis permasalahan ini adalah menurut (Ekawarna, 2018).

### **c. Tahap Manajemen Konflik**

Menurut Stevenin dalam (Muspawi, 2014), dalam menyelesaikan masalah terdiri atas beberapa tahap, diantaranya:

- 1) Pengenalan, adalah perbedaan atau kesenjangan yang terjadi dengan yang keadaan yang seharusnya antara dua pihak yang berkonflik.
- 2) Diagnosis, adalah mendeteksi penyebab konflik tersebut.
- 3) Menyepakati suatu solusi, adalah memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengajukan beberapa solusi, dan menetapkan solusi yang akan digunakan menurut keputusan bersama.
- 4) Pelaksanaan, adalah setelah solusi sudah disetujui maka dilakukan/ diterapkan atau diimplementasikan agar konflik yang terjadi dapat redam ataupun pihak yang bersangkutan dapat berdamai
- 5) Evaluasi, adalah setelah solusi dilaksanakan maka dilakukan evaluasi, menentukan penyebab konflik tersebut, agar tidak ada konflik yang terjadi dikemudian hari.

**d. Factor-Faktor Penyebab Manajemen Konflik**

Menurut Hendricks,W dalam (Dalimunthe, 2014) factor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik diantaranya :

- 1) Peristiwa sehari-hari, ini ditandai dengan adanya perasaan tidak puas atau merasa jengkel terhadap sesuatu yang terjadi.
- 2) Adanya tantangan, yang berarti setiap pihak yang berkonflik tidak mau mengalah dan saling mempertahankan pendapat masing-masing. Setiap pihak merasa pendapat mereka sesuai dengan keinginan hati mereka dan masih dikategorikan logis sehingga masing-masing pihak

hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi.

- 3) Adanya pertentangan, pada factor ini sudah mencapai pada tahap yang sangat serius. Masing-masing pihak ingin menang dengan melakukan segala macam cara, baik dengan cara positif maupun sebaliknya.

Menurut (Yuningsih, 2011), factor yang mempengaruhi manajemen konflik adalah :

- 1) Adanya tujuan atau kepentingan pribadi yang harus dipertahankan atau tidak berdasarkan kepentingan.
- 2) Hubungan dengan pihak lain, dalam berkonflik hubungan dengan pihak lain sangat memnpegaruhi tergantung kepentingan.

Sedangkan menurut Broadman dan Horowitz dalam (RICS, 2012), factor factor yang menyebabkan manajemen konflik yaitu :

- 1) Karakteristik isu konflik, ini sangat dipengaruhi pada gaya manajemen konflik yang digunakan.
- 2) Kepribadian individu yang terlibat konflik
- 3) Situasional, meliputi tingkat struktur kekuasaan, riwayat hubungan, lingkungan sosial serta pihak ketiga.

## **B. Konsep Administrasi Pertanahan**

### **1. Pengertian Administrasi Pertanahan**

Administrasi pertanahan merupakan kegiatan dalam organisasi dan manajemen yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah pada bidang pertanahan dengan memberikan kontribusi sumber daya guna mencapai tujuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Murad, 2013).

### **2. Fungsi Administrasi Pertanahan (Murad, 2013)**

- a. Planning* berarti juga perencanaan,
- b. Executing*, berarti pelaksanaan rencana dalam mencapai sebuah tujuan melalui sebuah pengambilan keputusan, pengendalian, serta pengawasan.
- c. Organizing*, yaitu mengorganisasikan dan membentuk kelompok dan hubungan antar individu.
- d. Persuading*, adalah memotivasi mereka dengan cara membujuk agar dapat saling bekerjasama, berkomunikasi, dan mengemukakan pendapat.
- e. Leading*, adalah memotivasi individu untuk melakukan hal-hal untuk bekerjasama, gotong royong.

*f. Evaluating*, yaitu memberikan penilaian atas fungsi pengendalian dan pengawasan, seperti teguran agar memunculkan sikap persuasi dan motivasi.

### 3. Ruang Lingkup Administrasi Pertanahan (Murad, 2013)

#### a. Penatagunaan Tanah

Penatagunaan tanah merupakan sekumpulan kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestrai, optimal, seimbang, dan serasi.

Pelaksanaan penatagunaan tanah dimulai dari mengumpulkan data tata guna tanah dengan memberikan fakta-fakta berdasarkan hasil survey dan analisa lapangan dikaitkan dengan kebijaksanaan rencana Pemerintah setempat dan perencanaan yang telah ditetapkan agar mendapatkan pemetaan data mengenai perencanaan, kemampuan dan hal mengenai penggunaan tanah.

Kebijakan penatagunaan tanah dilaksanakan terhadap :

- 1) Bidang-bidang tanah yang ada hak maupun belum terdaftar
- 2) Tanah milik Negara
- 3) Tanah ulayat masyarakat hokum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai RTRW.

Syarat-syarat untuk menggunakan tanah sesuai RTRW merupakan dasar dilaksanakannya administrasi pertanahan dimaksud dengan ancaman sanksi.

- 1) Tanah dalam kawasan lindung dan cagar budaya dapat diberikan hak atas tanah kecuali pada hutan dan lokasi situs.
- 2) Tanah yang berasal dari tanah timbul di wilayah perairan pantai yang dikuasai oleh Negara.
- 3) Penggunaan ataupun pemanfaatan tanah pada kawasan hutan lindung tidak boleh mengganggu fungsi dari alam itu sendiri,
- 4) Penggunaan tanah di kawasan budi daya harus dipelihara dan tidak boleh bertentangan dalam pemanfaatannya, serta harus saling mendukung dalam penggunaan tanah.
- 5) Pengelolaan penatagunaan tanah dan pengendalian dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan kegiatan pemantauan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- 6) Inventarisasi akan proses penatagunaan tanah terdiri dari penyajian neraca perubahan, kesesuaian, dan penetapan prioritas ketersediaan tanah.
- 7) Pelaksanaan penatagunaan tanah dimulai dari penataan kembali hingga pada pelepasan hak guna atas tanah kepada Negara dengan

penggantian sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

- 8) Penyesuaian penatagunaan tanah harus memepertimbangkan kebijakan, hak masyarakat pemilik tanah, investasi pembangunan sarana, serta evaluasi yang nantinya akan melibatkan masyarakat.
- 9) Pemantauan penatagunaan tanah dilakukan Pemerintah, sedangkan kegiatan penertiban dilakukan oleh Pemerintah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demi terlaksananya penatagunaan tanah ini dengan baik, maka dibutuhkan bantuan dari pihak BPN RI untuk menetapkan pedoman serta kriteria teknis agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan pedoman teknis sesuai dengan budaya dan kondisi masing-masing daerah.

b. Penatagunaan Penguasaan Tanah (*Landreform*). (Murad, 2013)

Landreform adalah serangkaian kegiatan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia yaitu terdiri atas perombakan tentang kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan penataan penguasaan tanah tertuang pada (Undang-Undang Nomor 1, 1958) tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikular, (Peraturan Pemerintah No 224, 1960) tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, (Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-1960, n.d.) tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Pelaksanaan tugas dan fungsi penatagunaan penguasaan tanah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya :

- 1) Pendaftaran pihak yang memiliki tanah yang melampaui batas maksimum yang diperbolehkan dalam satu keluarga atau tanah *absente*, yaitu tanah pertanian yang terletak di luar wilayah kedudukan/domisili si pemilik tanah atau tanah yang terletak jauh dari pemiliknya.
- 2) Meneliti tanah yang sudah terdaftar dalam daftar pada poin (1).
- 3) Menetapkan bagian atas tanah yang terkena *landreform*.
- 4) Melaksanakan penguasaan tanah yang terkena dampak *landrefrom* dan memberikan pernyataan sebagai tanah yang dimiliki oleh Negara.
- 5) Mengeluarkan Surat Izin Menggarap (SIM) pada pihak yang berkepentingan.
- 6) Mendaftar pihak penggarap dan melakukan penetapan prioritas penggarap yang berhak mendapatkan redistribusi berdasarkan ketentuan (Peraturan Pemerintah No 224, 1960).
- 7) Melakukan kegiatan redistribusi
- 8) Menyelesaikan persertifikatan tanah hasil redistribusi dan tanah milik sisa milik orang yang terkena dampak redistribusi sebagai tindak lanjut berdasarkan ketentuan (Peraturan Pemerintah No 10, 1960).
- 9) Melakukan kegiatan penyelenggaraan bagi hasil.

10) Mengatur penyelesaian gadai berdasarkan

11) Menegaskan obyek *landrefrom* lainnya berdasarkan

Tata cara penetapan ganti rugi, antara lain :

- 1) Tanah yang belum diberikan ganti rugi oleh Kepala Direktorat Agraria diusulkan ganti ruginya kepada Menteri Agraria cq Direktural Jenderal Agraria.
- 2) Tanah yang akan di ganti rugi dilakukan letak dan batas-batasnya oleh Pemerintah bersama Kepala Inspeksi Agraria ataupun masing-masing wakilnya,diuraikan dalam bentuk peta, dilakukan pengukuran,dan membuat pengukuran surat ukur pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
- 3) Ganti rugi berupa uang dilakukan taksiran terlebih dahulu oleh Panitia likwidasi, ataupun Panitia Pemeriksaaan Tanah dimana tanah itu berada.
- 4) Apabila tanah yang akan diganti rugi dilakukan pemberian akan tetapi terjadi permasalahan dengan pemberian haknya, maka surat Keputusan diganti berupa uang, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan No.SK.15/Depag/1966.
- 5) Apabila surat ukur atas bidang tanah yang bersangkutan belum dibuat, maka penerima sertifikat tersebut menerima sertifikat sementara atau sertifikat tanpa surat ukur.

### **c. Pengurusan Hak Tanah**

#### **1) Pengertian Pengadaan Tanah**

Pengadaan tanah adalah kegiatan dalam menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang adil kepada pihak yang berhak, dan selanjutnya tanah tersebut diberikan kepada Pemerintah yang bersangkutan. Kebijakan yang mengatur tentang Pengadaan Tanah adalah tentang Subyek Pengadaan Tanah.

Pihak yang dapat melakukan pengadaan tanah adalah Instansi Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat perintah khusus dari Pemerintah.

#### **2) Kepentingan Umum**

Kegiatan pembangunan yang termasuk dalam jenis kepentingan umum terdiri atas :

- a) Pertahanan dan Keamanan Nasional
- b) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.
- c) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.
- d) Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal.

- e) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi
- f) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik.
- g) Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah
- h) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah
- i) Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah
- j) Fasilitas keselamatan umum
- k) Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah
- l) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public.
- m) Cagar alam dan cagar budaya
- n) Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa
- o) Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.
- p) Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah
- q) Pasar umum dan lapangan parkir umum.

### **3) Tahapan Pengadaan Tanah**

- a) Perencanaan Pengadaan Tanah

Dalam pengadaan tanah dilakukan perencanaan dengan mengikutsertakan pemuka adat dan tokoh agam serta pemangku kepentingan. Perencanaan tersebut disusun berupa dokumen perencanaan pengadaan tanah. Di dalamnya berisi tujuan dan maksud rencana

pembangunan, letak tanah, luas tanah, serta segala yang berhubungan dengan kepentingan pertanahan.

Selanjutnya, dokumen tersebut disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dibantu oleh lembaga professional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

b) Persiapan Pengadaan Tanah

➤ Pemberitahuan rencana pembangunan

Rencana pembangunan diinformasikan kepada masyarakat, baik masyarakat langsung maupun masyarakat yang terkena dampak atas pembangunan tersebut.

➤ Pendataan awal lokasi rencana pembangunan

Pendataan awal berarti kegiatan pengumpulan data awal dari pihak yang berhak serta obyek pengadaan tanah yang dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja.

➤ Konsultasi publik rencana pembangunan

Konsultasi publik dilakukan selama 60 (enam puluh) hari kerja dengan mengikutsertakan pihak yang berhak atas tanah ataupun yang terkena dampak, dan konsultasi diselenggarakan di lokasi rencana pembangunan itu teletak.

#### 4) Pelaksanaan pengadaan tanah

Instansi yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan yaitu BPN RI. Penilaian obyek pengadaan tanah dilakukan oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan oleh BPN RI.

Dalam penilaian ganti rugi dilakukan pada tiap-tiap bidang tanah, yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Bentuk ganti rugi berbagai macam, diantaranya dalam bentuk uang, tanah penggantian, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Obyek pengadaan tanah yang diberikan ganti rugi, antara lain sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan, kepemilikannya masih menjadi permasalahan, disita oleh pejabat yang berwenang, dan juga menjadi jaminan di bank.

##### d. Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Murad, 2013)

Kegiatan ini adalah bentuk tindak lanjut dari kegiatan pembangunan pendaftaran tanah yang menjadi landasan penyelenggaraan pendaftaran tanah sesuai tentang Pendaftaran Tanah.

#### **4. Catur Tertib Administrasi Pertanahan**

##### **a. Tertib Hukum Pertanahan**

Tertib hukum pertanahan dilaksanakan agar terciptanya ketentraman masyarakat dan memotivasi gairah dalam pembangunan.

##### **b. Tertib Administrasi Pertanahan**

Tertib administrasi pertanahan dilakukan agar mendapatkan pelayanan yang berdasarkan pelayanan umum adil dan merata.

##### **c. Tertib Penggunaan Tanah**

Tertib penggunaan tanah maksudnya, tanah harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kesuburan serta kemampuan tanah.

##### **d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup**

Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup merupakan usaha untuk menghindari kerusakan tanah, menjaga kualitas sumber daya alam,

#### **C. Konsep Infrastruktur (Kumari & Kumar Sharma, 2017)**

##### **1. Pengertian Infrastruktur**

Infrastruktur dideskripsikan sebagai "payung" yang mana mencakup beberapa kegiatan, diantaranya jalan, jembatan, terowongan, kereta api, pelabuhan, bandara, trem, kereta bawah tanah, jaringan irigasi, bendungan dan kanal, pipa air, pemurnian air dan pabrik pengolahan, pasokan air minum, saluran listrik, pembangkit listrik, jaringan distribusi listrik, pipa minyak dan

gas, fasilitas sanitasi dan pembuangan limbah, layanan kesehatan dan perumahan, layanan perkotaan, komunikasi dan telekomunikasi.

## **2. Karakteristik Infrastruktur**

Karakteristik pada infrastruktur ini penting untuk ditinjau, karena banyak sector swasta yang tidak ingin ikut campur berkontribusi dalam pengerjaan proyek infrastruktur ini terkait dengan beberapa hambatan yang akan menjadi dampaknya, diantaranya resiko yang tinggi, pengembalian yang rendah, modal yang tinggi, dan aturan dalam penetapan harga.

## **3. Macam-macam Infrastruktur**

- a. Infrastruktur fisik, seperti transportasi, listrik, dan telekomunikasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Infrastruktur sosial, berarti ikut membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan mata pencaharian.
- c. Infrastruktur pedesaan dan perkotaan, pada perkotaan seperti konektivitas jalan, transportasi, listrik, air bersih, air minum, limbah, sanitasi, distribusi gas, dan kesehatan. jalan sangat penting. Pada pedesaan, seperti meningkatkan produktivitas pertanian, memperbanyak penyediaan peluang kerja, menumbuhkan pasar lokal, meningkatkan standar hidup dan memperluas wilayah perdagangan.

- d. Infrastruktur keuangan, terdiri atas investasi public dan investasi swasta.
- 1) Investasi public, adalah pemerintah adalah penanggung jawab atas keberlangsungan pembangunan infrastruktur, terdiri atas perlindungan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur dan pendapatan yang lebih tinggi.
  - 2) Investasi swasta, berarti pengalihan tanggung jawab dari pihak public ke pihak swasta. Pihak swasta memiliki keuntungan diantaranya, teknologi modern, strategi pengurangan resiko yang efektif, dan perencanaan yang baik dalam menyelesaikan proyek infrastruktur.
  - 3) Investasi asing langsung, merupakan dana yang digunakan adalah dana dari luar (asing), dimana pihak asing tersebut selalu mengawasi investor yang akan berinvestasi.
  - 4) Kemitraan public-swasta, terbagi atas pendanaan swasta mendukung pembangunan operasi, pemeliharaan, dan pengembangan seluruh infrastruktur, perjanjian yang sudah lama terkait dengan kerjasama antara pihak public dengan swasta terhadap kesuksesan pembangunan, mitra ini menyediakan layanan infrastruktur bagi masyarakat atas nama public.

#### 4. Peran Infrastruktur

##### a. Pembangunan ekonomi

Infrastruktur sangat berperan pada aspek pertumbuhan ekonomi diantaranya, mendukung fungsi produksi, kelancaran dalam perdagangan, biaya yang lebih rendah, pasar yang lebih luas, dan lapangan kerja yang tinggi.

##### b. Pembangunan sosial

Aspek sosial sangat berperan dalam infrastruktur, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rumah tangga.

##### c. Pembangunan pertanian

Infrastruktur pedesaan yang sudah berkembang menjadi baik, diantaranya fasilitas irigasi, pasokan air, sumur tabung, gudang penjualan, dan penyimpanan pupuk, serta produksi pertanian dengan biaya yang rendah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pertanian.

##### d. Pembangunan daerah

Pembangunan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan pembangunan daerah, sehingga dapat menciptakan peluang kerja dan mendapatkan penghasilan yang dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat.

e. Distribusi pendapatan

Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang tinggi di pedesaan akan mengurangi kesenjangan pendapatan, serta ketidakcukupan dana juga akan menyebabkan kesenjangan regional, distribusi pendapatan yang tidak seimbang, dan kemiskinan.

f. Pengurangan kemiskinan

Kemiskinan akan menciptakan hambatan bagi pertumbuhan sosial. Individu yang miskin tidak dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hingga mereka mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, harus dipacu dengan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## **5. Resiko Proyek Infrastruktur**

Resiko dalam pembangunan infrastruktur dapat dibagi atas 5 kategori, diantaranya :

- a. Resiko komersial, mencakup atas teknis proyek pembangunan infrastruktur itu sendiri yang terdiri dari resiko operasional, resiko kinerja, dan resiko konstruksi.
- b. Resiko keuangan, mencakup atas keuangan atas proyek pembangunan infrastruktur atau bisa dikatakan perihal pendanaan. Termasuk di dalamnya resiko akutansi, resiko kebangkrutan, resiko fluktuasi, dan inflasi.

- c. Resiko Negara dan komunitas, mencakup kondisi politik dan hukum dalam suatu ekonomi seperti, kerusuhan, pelanggaran kontrak/ peraturan politik.
- d. Resiko memaksa, berarti resiko ini tidak dapat dikendalikan dikarenakan beberapa hal diluar kemampuan, seperti bencana gempa bumi, tanah longsor, kerusuhan, dsb.
- e. Resiko lainnya, termasuk didalamnya resiko dalam aksi pencurian.

#### **D. Kajian Penelitian yang Relevan**

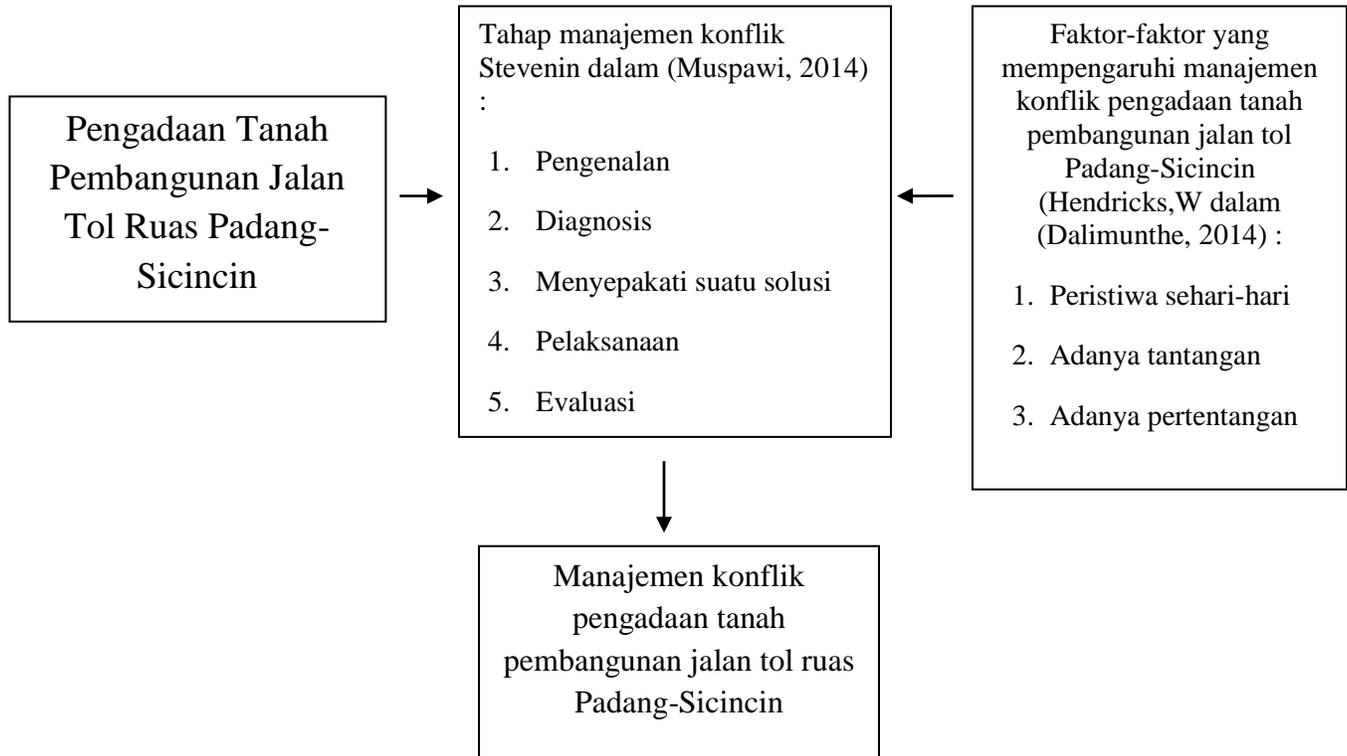
Beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Kajian Penelitian yang Relevan**

<b>No</b>	<b>Nama/Judul Penelitian</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Metodologi yang digunakan</b>	<b>Hasil</b>
1	Manajemen Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang (Hassan, n.d.)	Manajemen Konflik Terhadap Pembangunan	Peneliti menggunakan penelitian kualitatif	Harga ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Adanya konflik terhadap keinginan dan kebutuhan Munculnya pihak baru yang akan mempengaruhi masyarakat terkait dengan harga ganti rugi yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
2	Analisis Dampak Sosial Ekonomi	Dampak Sosial & Ekonomi	Metodologi yang	Pengaruh antara pembangunan jalan

	Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kec. Wringinanom, Kec. Kedamean, Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik) (Noor, Hamdan, Saifuddin, & Fanan, 2012)	Terhadap Pembangunan	digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif	tol dengan mata pencaharian masyarakat sekitar tidak terlalu mencolok. Dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah PNS bukan petani.
3	Konflik Agraria Pembangunan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Studi Kasus Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (Haines et al, 2013)	Manajemen Konflik Terhadap Pembangunan	Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif	Pemerintah memberikan ganti rugi terhadap tanah yang akan dibangun jalan tol. Pemerintah melalui panitia pelaksana pembangunan menitipkan uang ganti rugi pada pengadilan setempat, dan bagi masyarakat yang tidak mengambil ganti rugi, tanah akan tetap dibebaskan, serta pembangunan akan tetap dilanjutkan.

### E. Kerangka Konseptual



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini maka penulis menjelaskan kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah dibahas di bab sebelumnya, sebagai berikut :

1. Manajemen konflik pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin dapat dilihat dari 5 tahap berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh (Ekawarna, 2018) dan keseluruhan tahap telah selesai dilaksanakan hingga panjang 4 km, dimana Korong yang terkena dampak diantaranya, Korong Pinang, Bintungan, Chaniago, Koto, dan Kasai. Tahap pertama adalah pengenalan, bahwa pembangunan jalan tol pernah diinfokan kepada masyarakat namun hanya sekali tentunya tahapan ini belum maksimal. Tahap kedua yaitu diagnosis, masing-masing pihak yang berkonflik yaitu masyarakat dan Pemerintah belum seluruhnya menyadari penyebab dari konflik sehingga isu dari penyebab konflik itu sendiri masih diragukan, tahap ketiga adalah menyepakati solusi, bahwa baik Pemerintah maupun masyarakat sudah memikirkan solusi masing-masing agar konflik ini dapat selesai, tahap keempat yaitu pelaksanaan, masing-masing pihak yang berkonflik belum sepenuhnya menjalankan solusi yang mereka inginkan sehingga konflik itu sendiri masih melulu terjadi, tahap kelima

evaluasi, setelah mengetahui penyebab dari konflik tersebut maka dilakukan tahapan evaluasi dimana menghindarkan penyebab tersebut agar tidak terjadi hal yang serupa dikemudian hari.

2. Factor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik dalam pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin didasarkan pada factor peristiwa sehari-hari dimana masih terdapatnya rasa jengkel dan sakit hati akibat kesalahpahaman yang terjadi antara Pemerintah dengan masyarakat, factor tantangan dimana tiap pihak saling menunjukkan ego mereka demi kepentingan pribadi, factor pertentangan dikarenakan tidak adanya pihak yang mengalah maka timbulnya rasa ingin menang tanpa menimbang dengan cara apapun. Dapat diketahui bahwa factor yang paling mempengaruhi manajemen konflik pembangunan jalan tol adalah factor peristiwa sehari-hari karena faktor ini akan selalu terjadi tiap pembangunan jalan tol, dimulai dari rasa jengkel masyarakat akan harga, ganti rugi yang belum selesai, hingga dampak yang diterima masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

**B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang penulis jabarkan, maka penulis menyarankan:

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan menjaga komunikasi dengan masyarakat serta melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak jalan tol.
2. Kepada masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang belum kepastiannya dan menghindari tindakan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

- Pemerintah, Peraturan No 224. , (1960).  
*PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 10 /PRT/M/2018.*  
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010. , (2010).  
 Peraturan Pemerintah No 10. , (1960).  
 Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005.

### Buku

- Ekawarna. (2018). *Manajemen Konflik dan Stres*. Jakarta: Bumi Aksara.  
 Kotler. (2015). *Pengantar Manajemen*. 30.  
 Murad, R. (2013). *Administrasi Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju.  
 Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian(Studi Kasus)*. (April 2015), 31–46.

### Artikel /Jurnal

- Andhika, L. R. (2017). Meta-Theory: *Kebijakan Barang Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(1), 41–55.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jekp.v8i1.697>
- Binti Ida Umaya. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01, 1–7. Retrieved from <http://www.albayan.ae>
- Budiati, L. (1980). *Ruang lingkup manajemen karir*. 1–54.
- Dalimunthe, S. F. (2014). *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*. Palangka Raya *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 8(1), 21–37.  
<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). *Manajemen*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Haines et al, 2019. (2013). *Konflik Agraria Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hakim, L. N. (2013). *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. *Review of Qualitative Method : Interview of the Elite*. *Aspirasi*, 4(2), 165–172.
- Hassan, H. (n.d.). *Manajemen Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang*. 1–20.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. R. (2012). *Sugiyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran* , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hal.126 72 1. 72–92.
- Indrawati, S. W., Herlina, & Misbach, I. H. (2007). *Mata kuliah psikodiagnostik ii (observasi)*.

- Kumari, A., & Kumar Sharma, A. (2017). *Infrastructure financing and development: A bibliometric review*. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 16, 49–65. <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2016.11.005>
- Laras, H. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu*. 368.
- Manoppo, P. G. (2017). *TOL MANADO-BITUNG 2 DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK EKOSOBILING & MODAL SOSIAL PEMILIK TANAH*. (3), 208–226.
- Muspawi, M. (2014). *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)*. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41–46.
- Noor, T. R., Hamdan, A., Saifuddin, & Fanan, M. A. (2012). *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto ( Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kec . Wringinanom , Kec . Kedamean , Kec . Driyorejo Kabupaten Gresik)*. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 1(2), 268–280. Retrieved from <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/154>
- Paul M. Muchinsky. (2012). *Studi Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan*. *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pupu, S. R. (2009). *Penelitian Kualitatif*. *Journal Equilibrium*, Vol. 5, pp. 1–8. Retrieved from [yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf)
- Rachmawati, I. D., & Handoyo, P. (2014). *Konflik Sosial Warga Pereng Akibat Pembebasan Lahan TOL SUMO di Sidoarjo*. *Paradigma*, 2(3). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/250722-konflik-sosial-warga-pereng-akibat-pembe-b8c0a90a.pdf>
- Rausch, D. O. (1990). *Management and organization*. In *Surface Mining*. <https://doi.org/10.1201/b22034-6>
- RICS. (2012). *32954-IDFaktor Pemicu Konflik Pertanahan studi kasus Konflik Pertanahan*. *JOM FISIP*, 3(1), 1–11. Retrieved from <https://www.rics.org/south-asia/upholding-professional-standards/standards-of-conduct/ethics/>
- SANTOSO, N. B. (2017). *Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol ( Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo – Ngawi - Kertosono Ruas Ngawi - Kertosono Paket 3 )*. 1–15.
- Sumaryoto. (2010). *Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi Lingkungannya*. *Journal of Rural and Development*, 1(2), 161–168.
- Yuningsih, A. (2011). *Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Konflik The Arena Model of Conflict Strategies Approach*. *Jurnal Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 195–202.

#### Website

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190617201255-92-404045/pemerintah-pastikan-tol-padang-pekanbaru-tetap-dibangun> (diakses tanggal 18 Juni 2019)

<https://kppip.go.id/en/> (diakses tanggal 25 Agustus 2019)

<https://sumbar.antaranews.com/berita/231974/wagub-sebut-penyelesaian-pembebasan-lahan-tol-padang-pekanbaru-butuh-dasar-hukum> (diakses tanggal 30 Agustus 2018)

<https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2019/di-demo-soal-ganti-rugi-lahan-tol-wagub-sumbar-balik-meradang/> (diakses tanggal 23 Januari 2019)

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4960935/sudah-18-proyek-tol-padang-sicincin-dikebut> (diakses tanggal 01 April 2020)